

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Perkembangan pendidikan dewasa ini semakin dirasakan kemajuan dan manfaatnya dalam menunjang pembangunan. Hal ini berarti bahwa pendidikan bagi bangsa Indonesia sudah menjadi kebutuhan pokok guna berlangsungnya hidup dan peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Untuk itu sektor pendidikan perlu mendapat perhatian yang serius, karena memikul tanggung jawab yang besar dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pembangunan sektor pendidikan sangat strategis dan mutlak diperlukan dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam mukaddimah UUD 1945. Kesadaran akan peranan pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, telah mendorong pemerintah berupaya terus agar dapat memberikan layanan pendidikan bagi setiap warga negara. Hal ini dimaksudkan bahwa hanya dengan tingkat pendidikan yang memadai masyarakat akan lebih mudah diarahkan dan diajak berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan.

Menghadapi tantangan masa depan yang lebih kompleks dan ditandai dengan persaingan global di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi serta informasi, lembaga pendidikan dituntut peran maksimalnya menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai tuntutan dan persyaratan global. Untuk mencapai tujuan pemerintah tersebut secara khusus telah tergambar dalam Undang-Undang Republik Indonesia No: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 disebutkan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Selanjutnya pada Tap MPR No IV 1999, tentang GBHN, Bab IV dijelaskan bahwa salah satu kebijakan pembangunan nasional dibidang pendidikan ayat 7 yaitu: mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara, terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai uapaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi mudah dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan lingkungan sesuai dengan potensinya.

Untuk mendapatkan sarana yang dapat mendukung baik pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah, karena keberhasilan pembangunan itu sangat ditentukan oleh faktor manusia, dan manusia yang menentukan keberhasilan melalui kemampuan membangun. Kemampuan membangun ini hanya dapat dibina melalui pendidikan. Dalam mencapai tujuan tersebut, baik pemerintah maupun masyarakat menyelenggarakan pendidikan salah satu di antaranya ialah lembaga penddikan yang diidentifikasi sebagai sekolah dasa (SD). Sekolah Dasar merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar yang menyelenggarakan program 6 tahun. Keberadaannya adalah sangat urgen bagi kepentingan pengembangan Sumber Daya Manusia, sebab mulai pendidikan di SD seseorang dikembangkan untuk menguasai berbagai kemampuan dasar sebagai bekal dirinya bagi pendidikan selanjutnya.

Pemertaan pendidikan merupakan masalah yang rumit dan kompleks dihadapi pemerintah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1) terbatasnya dana yang tersedia, (2) keadaan geografis, (3) keadaan penduduk yang tidak merata, (4) faktor ekonomi, dan (5) sosial budaya masyarakat. Namun demikian pemerataan dan pemberian kesempatan memperoleh pendidikan mutlak diupayakan sebagaimana diamanatkan konstitusi. Dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 dinyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas kesempatan

yang seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan agar memperoleh pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan tamatan pendidikan dasar.

Sekalipun negara menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan, namun tidak semuanya menggunakan haknya dengan baik. Hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat tentang pentingnya pendidikan dalam meningkatkan taraf hidupnya. Selain itu, masalah kesulitan ekonomi dan jarak tempat tinggal dengan sekolah yang berjauhan serta masih kurangnya daya tampung lembaga pendidikan. Oleh karena itu pemerintah menetapkan kebijakan perlunya diadakan gerakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

Jenjang pendidikan dasar sebagai prioritas wajib belajar merupakan program pendidikan 6 tahun di sekolah dasar dan 3 tahun di SLTP dan yang sederajat di dalam PP No 28 Tahun 1990 pasal (3) dikatakan, bahwa pendidikan dasar bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya. Konsekuensi dari penetapan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, menuntut semua tamatan SD harus ditampung untuk mengikuti pendidikan di SLTP. Oleh karena itu, daya tampung SLTP harus ditingkatkan untuk dapat melayani kebutuhan peserta didik wajib belajar 9 tahun. Peningkatan daya tampung tersebut merupakan kriteria terpenting dalam pemberhasilan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun sehingga harus didukung dengan perencanaan kebutuhan yang matang.

Lembaga pendidikan di sekolah dasar apabila dilihat bangunan dan seperangkat sarana fisiknya semata-mata, barangkali merupakan hal yang tidak sulit untuk pengadannya. Namun lembaga pendidikan ini tidak hanya terdiri dari bangunan dan seperangkat sarana fisik saja, melainkan terdapat hal yang amat vital harus ada di lembaga pendidikan adalah tenaga kependidikan, khususnya tenaga guru maka perlunya diadakan perencanaan kebutuhan guru dalam meningkatkan kualitas peserta didik melalui pendidikan. Mengenai peran

pentingnya tenaga guru dalam lembaga pendidikan persekolahan, dimana guru merupakan kunci dalam peningkatan mutu pendidikan dan mereka berada di titik sentral dari setiap usaha reformasi pendidikan yang diarahkan pada perubahan-perubahan kualitatif. Setiap usaha peningkatan mutu pendidikan seperti pembaharuan kurikulum, pengembangan metode mengajar, penyediaan sarana dan prasarana hanya berarti apabila melibatkan guru. Tanpa guru pendidikan hanya akan menjadi slogan karena segala bentuk kebijakan dan program pada akhirnya akan ditentukan oleh kinerja pihak yang berada di garis terdepan adalah guru. Dimana ketersediaan guru yang cukup merupakan kunci utama dalam berlansungnya proses belajar mengajar dengan baik pada setiap lembaga pendidikan.

Kebutuhan tenaga guru di Indonesia akan cenderung meningkat sehubungan dengan program perluasan pendidikan, khususnya pendidikan dasar. Salah satu faktor penyebab kekurangan guru sekolah dasar merupakan persebaran penempatan guru yang tidak merata antar satu sekolah dengan sekolah yang lain dan itu terlihat pada sekolah dasar yang berada di Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato. Masalah ini dapat diatasi secara administrative dengan adanya rotasi atau mutasi guru dari sekolah ke sekolah yang lain yang mengalami kekurangan guru dan ada juga sekolah yang kelebihan guru dimana mutasi hanya merupakan suatu kebijakan dari pemerintah daerah dan tidak melihat keberadaan guru sehingga penempatan guru tidak melalui perencanaan kebutuhan guru sehingga ada sekolah yang kekurangan guru dan ada sekolah yang kelebihan guru.

Setelah diberlakukannya wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang dimulai tahun 1994, dengan pemantapan kurikulumnya memberikan kontribusi terhadap bertambahnya kebutuhan tenaga guru. Dalam kaitannya dengan kebutuhan tenaga guru untuk pendidikan SD dari aspek kuantitatif antara lain disebabkan oleh tingginya pertumbuhan populasi usia sekolah, dimana populasi usia sekolah yang melaju memberikan tekanan yang kuat agar sekolah dapat meningkatkan daya tampungnya di atas kapasitas yang telah ditentukan.

Karena itu pada setiap jenjang sekolah tampak membengkak dengan ditandai oleh berdesak-desak jumlah peserta didik untuk tiap kelas.

Meskipun demikian, diantara banyak faktor yang dibenahi, maka faktor tenaga pendidik (guru) merupakan faktor dominan yang turut menentukan keberhasilan dan kualitas pendidikan. Itulah sebabnya perhatian terhadap guru tidak dapat diabaikan. Perhatian atastugas guru tersebut dilakukan antara lain dengan menata penempatan guru yang disesuaikan dengan kondisi wilayah, keberadaan guru, dan kebutuhan sekolah. Dengan demikian masalah penempatan guru tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan baik secara eksternal maupun secara internal.

Berdasarkan observasi awal peneliti lakukan di Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato khususnya di Sekolah Dasar yang pertama melihat kondisi penempatan guru di sekolah dasar, ada kecenderungan penempatan seorang guru tidak didasarkan atas faktor-faktor di atas. Akibatnya setiap tahun surat permohonan untuk pindah tempat tugas meningkat. Kedua dalam hal pengangkatan calon guru Negeri Sipil Pemerintah Daerah dalam hal ini sepenuhnya menempatkan sesuai dengan analisis kebutuhan sekolah karena masih ada pertimbangan domisili keluarga guru yang bersangkutan jika ditempatkan didaerah terpencil sementara sesuai data yang ada daerah terpercillah yang sangat membutuhkan guru. Begitu juga dalam hal pemindahan guru (mutasi) sasaranya bukan untuk kebutuhan tetapi hal-hal lain seperti tidak loyalitas dengan atasan sehingga sangat sulit untuk bisa mencapai apa yang diharapkan untuk menuju pendidikan yang bermutu.

Memperhatikan permasalahan di atas dan melihat kondisi Sekolah Dasar yang ada di Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato sangat memprihatikan dalam hal masih kurangnya tenaga guru di Sekolah Dasar sedangkan jumlah peserta didik yang semakin banyak sehingga proses kegiatan belajar mengajar tidak efektif dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kondisi ini mendorong penulis untuk mengkaji masalah ini dengan formulasi judul.”

Perencanaan Kebutuhan Guru Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana keadaan guru di Sekolah Dasar Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato
2. Bagaimana kompetensi guru yang dibutuhkan di Sekolah Dasar Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato
3. Bagaimana penempatan guru di Sekolah Dasar Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui data keadaan guru di di Sekolah Dasar Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato
2. Untuk Mengetahui gambaran kompetensi guru yang dibutuhkan di Sekolah Dasar Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato.
3. Untuk mengetahui gambaran penempatan guru di Sekolah Dasar Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan masukan untuk Kepala Cabang Diknas untuk melakukan data kembali tentang kebutuhan guru yang berada di Sekolah Dasar Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato

2. Sebagai bahan masukan untuk Kepala sekolah untuk dapat mengkaji kembali kebutuhan guru yang ada di sekolah masing-masing
3. Sebagai bahan masukan bagi para guru untuk mencari kiat-kiat yang dapat meningkatkan kemampuannya dalam merencanakan pembelajaran di Sekolah Dasar Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato.
4. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan mendapat informasi mengenai kebutuhan guru Sekolah Dasar yang berada di Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato.